

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur atau mengurus daerahnya sendiri. Ditinjau dari aspek kemandirian daerah, pelaksanaan otonomi diharapkan mampu menciptakan kemandirian daerah dalam mengatur dan mengelola daerahnya dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Menyadari pentingnya otonomi daerah tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang ini membawa perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi sendiri. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten/kota pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara transparansi, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Selain itu juga bersifat luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan yang diserahkan itu harus diselenggarakan dalam konteks tujuan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan

kehidupan demokrasi, serta keadilan dan pemerataan. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka desentralisasi, harus pula disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Kota Kupang sebagai Ibukota Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang juga sebagai barometer NTT tumbuh sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan dan sektor jasa sehingga menjadi magnet bagi masyarakat dari daerah daerah wilayah NTT untuk datang mengadu nasib maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana sosial yang lengkap sangat dibutuhkan karena fungsinya sebagai ibukota wilayah yang menjadi alasan penduduk untuk bertempat tinggal. Salah satu sarana dan prasarana adalah pembangunan infrastruktur jalan raya yang memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktifitas ekonomi, sosial, budaya dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi masyarakat di Kota Kupang.

Penyediaan infrastruktur, prasarana dan fasilitas umum di Kota Kupang merupakan salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa yang ditangani langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang melalui pelelangan umum maupun penunjukan langsung. Namun, dalam tahapan pelaksanaan proyek di Kota Kupang selalu mendapatkan kendala, baik kendala yang sudah diperhitungkan maupun yang diluar perencanaan. Kendala itu menjadi terhambatnya pekerjaan proyek konstruksi, sehingga pekerjaan tersebut tidak berlangsung sesuai dengan rencana.

Belanja modal diperlukan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah pusat terus menghimbau pemerintah daerah (pemda) agar terus meningkatkan persentase belanja modal. Penambahan persentase belanja modal tidak sulit karena dilakukan secara bertahap.

Untuk lebih jelas berikut merupakan Data Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang dari Tahun 2010-2014 :

Tabel 1.1

**Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2010-2014
(dalam rupiah)**

URAIAN	TAHUN				
	2010	2011	2012	2013	2014
Pendapatan Asli Daerah	215.000.000,00	216.793.910,00	219.700.000,00	225.000.000,00	250.000.000,00
Pendapatan Transfer	-	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan	215.000.000,00	216.793.910,00	219.700.000,00	225.000.000,00	250.000.000,00
Belanja Operasional	2.791.341.440,00	3.523.786.000,00	4.031.106.703,00	3.991.341.440,00	4.130.016.880,00
Belanja Modal	60.672.304.896,00	42.625.881.090,00	27.213.385.652,00	37.469.126.242,00	48.666.833.744,99
Belanja Tak Terduga	-	-	-	-	-
Transfer	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja dan Transfer	63.463.646.336,00	46.149.667.090,00	31.244.492.355,00	41.460.467.682,00	52.796.850.624,99
Surplus/Defisit	63.248.646.336,00	45.932.873.180,00	31.024.792.355,00	41.235.467.682,00	52.546.850.624,99

Sumber : Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang terus meningkat setiap tahunnya. Sedangkan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah tidak dianggarkan dalam (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) APBD Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang. Hal ini disebabkan karena Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang tidak

mengelola komponen-komponen pendapatan seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Demikian juga untuk komponen belanja tak terduga dan transfer. Sedangkan untuk belanja modal yang dianggarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang pada Tahun 2010-2014 cenderung mengalami penurunan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pertumbuhan Belanja Modal Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2010-2014”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertumbuhan belanja modal Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang tahun anggaran 2010-2014?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan menurunnya anggaran belanja modal Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2010-2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertumbuhan belanja modal Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang tahun Anggaran 2010-2014
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab menurunnya belanja modal Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang : sebagai bahan referensi dalam melakukan pengelolaan terhadap belanja modal.
2. Bagi peneliti selanjutnya : penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengadakan penelitian lanjutan berkaitan dengan realisasi belanja modal.